

**BAB 4**  
**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DI TINGKAT PROVINSI**  
**TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

Pada bab ini akan dijelaskan hasil pengolahan data sekunder dengan menggunakan software Eviews serta interpretasi dari hasil tersebut. Analisis yang digunakan adalah analisis inferensial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perbandingannya dengan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan rata-rata pertumbuhan ekonomi dari provinsi tertentu berdasarkan interpretasi hasil *Eviews*.

**4.1 Hasil Estimasi**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan daerah dapat direpresentasikan dengan Dana Perimbangan. Sehingga penelitian ini mengajukan model persamaan ekonometrika berikut:

$$LnPDRB = \gamma_0 + \gamma_1 DPRasio + \gamma_2 LnInv + \gamma_3 LnTK + \varepsilon \dots\dots\dots (4.1)$$

Model tersebut kemudian diestimasi dengan metode *random effect*. Hasil estimasi dari model tersebut ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Estimasi Persamaan Model 2**

Variabel	Koefisien	Std Error	t-stat	Prob
C	-2.1625	1.1415	-1.8944	0.0593
DPRasio	0.0035	0.0009	3.9367	0.0001
Log (Inv)	0.4235	0.0108	39.0581	0.0000
Log (TK)	0.7381	0.0801	9.2161	0.0000
R <sup>2</sup>	0.9903			
N	260			

Sumber: Output Eviews

Dari tabel diatas terlihat bahwa model penelitian secara statistik relatif baik. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang mendekati 1. Variabel bebas dalam model ini dapat menjelaskan 99,03% pengaruhnya terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan, misalnya kondisi sosial politik, keamanan dan lain-lain. Masalah heteroskedastisitas telah diatasi saat pengolahan data dengan Eviews melalui pengujian *White Heteroscedasticity*. Sanjaya (2009) yang

mengutip Gujarati (2004) menyebutkan bahwa pada umumnya masalah multikolinearitas sangat jarang terjadi pada data panel. Jika multikolinearitas terjadi maka dapat diabaikan dengan merujuk teori serta penelitian sebelumnya. Selain itu, data panel yang diestimasi dengan *random effect* tidak perlu dilakukan pengujian autokorelasi karena estimator tersebut menggunakan metode GLS yang secara otomatis akan melakukan *weighted* atas kasus autokorelasi.

Dari hasil output *Eviews* diketahui bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti, jika terjadi peningkatan Dana Perimbangan pada total pendapatan, investasi swasta dan tenaga kerja maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan Dana Perimbangan, investasi swasta dan tenaga kerja di tingkat provinsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat diterima.

## 4.2 Diskusi

Salah satu saran dalam pengembangan model ini adalah penggunaan rasio PAD terhadap Dana Perimbangan untuk mencerminkan derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Saran tersebut terkait dengan penciptaan variabel yang dapat melihat kemampuan pengumpulan pendapatan suatu provinsi baik secara internal maupun eksternal secara bersamaan. Nilai PAD menggambarkan kemampuan suatu provinsi mengumpulkan pendapatan secara internal sedangkan nilai Dana Perimbangan menggambarkan kemampuan mengumpulkan pendapatan secara eksternal. Semakin besar nilai rasio ini berarti suatu provinsi mempunyai tingkat kemandirian finansial yang lebih baik. Variabel ini dianggap lebih baik dibanding variabel yang digunakan pada model diatas yang hanya dapat menunjukkan kemampuan pemerintah provinsi mengumpulkan dana secara eksternal semata.

Penulis sudah mengakomodir saran pengujian dengan menggunakan rasio ini dalam persamaan ekonometri. Karena rasio tersebut sudah berbentuk persentase maka tidak digunakan logaritma. Sehingga persamaan ekonometri yang dapat dibentuk adalah:

$$\text{LnPDRB} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{PadDpRasio} + \gamma_2 \text{LnInv} + \gamma_3 \text{LnTK} + \varepsilon \dots\dots\dots (4.2)$$

Model tersebut kemudian diestimasi dengan metode *random effect*. Hasil estimasi dari model tersebut ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Estimasi Model**

Variabel	Koefisien	Std Error	t-stat	Prob
C	-1.6694	1.1491	-1.4529	0.1475
PadDpRasio	5.24E-10	7.14E-10	0.7336	0.4639
Log (Inv)	0.4274	0.0112	38.2130	0.0000
Log (TK)	0.7041	0.0805	8.7454	0.0000
R <sup>2</sup>				0.9897
N				260

Sumber: Output Eviews

Dari tabel diatas terlihat bahwa model penelitian secara statistik relatif baik. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang mendekati 1. Variabel bebas dalam model ini dapat menjelaskan 98,97% pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dari hasil output *Eviews* diketahui bahwa rasio PAD terhadap Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan investasi swasta dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Model ini tidak dapat digunakan karena rasio PAD terhadap Dana Perimbangan adalah tidak signifikan meskipun Investasi dan Tenaga Kerja berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi.

Dengan demikian, maka model yang selanjutnya akan penulis analisis lebih lanjut adalah model awal. Hal ini karena pencerminan desentralisasi fiskal dalam model ini adalah tidak signifikan.

### 4.3 Analisis Hasil Estimasi Model

Model penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, yaitu Dana Perimbangan, investasi swasta dan angkatan kerja yang bekerja. Dimana rasio Dana Perimbangan pada total pendapatan daerah mencerminkan desentralisasi fiskal. Pada bagian ini akan dijelaskan dampak masing-masing variabel bebas tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## 1. Hubungan antara Dana Perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah

Koefisien regresi variabel dana perimbangan adalah 0,0035 artinya jika rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan naik 1%, ceteris paribus, maka PDRB akan tumbuh 0,0035%. Hubungan positif antara dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan studi-studi sebelumnya, yaitu Meloche, Vallaincourt dan Yilmaz (2004), Brata (2004), Pusporini (2006), Suska (2007) dan Usman (2009).

Hubungan positif antara Dana Perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan teori awal pembentukan model penelitian ini, yaitu penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah akan diakumulasi menjadi modal yang merupakan salah satu bentuk investasi tidak langsung. Todaro (2004) menyebutkan bahwa investasi penunjang sarana untuk meningkatkan produktivitas merupakan bentuk dari investasi tidak langsung. Teori pertumbuhan ekonomi juga menyebutkan bahwa kapital merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah output.

Hubungan Dana Perimbangan yang signifikan namun sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berhubungan dengan cara penggunaan dari Dana Perimbangan itu sendiri. Todaro (2000) menyatakan bahwa besarnya pendapatan transfer dan distribusi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah desentralisasi, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah barulah merupakan syarat perlu (*necessary condition*). Syarat cukupnya (*sufficient condition*) adalah bagaimana proses perencanaan dilakukan, bagaimana pengelolaan anggaran/keuangan daerah, bagaimana respon pemerintah daerah dan bagaimana sumber daya manusianya serta kelembagaan ekonomi yang ada di daerah. Sehingga hubungan dana perimbangan yang sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa mayoritas provinsi belum memenuhi syarat cukupnya (*sufficient condition*).

Seperti yang telah disebutkan diatas, bentuk pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari syarat cukup. Komposisi terbesar dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran rutin seperti gaji pegawai sedangkan belanja pembangunan yang memicu pertumbuhan

ekonomi berasal dari DAK yang justru mempunyai porsi terkecil dari Dana Perimbangan. Usman (2009) menyebutkan bahwa dari sisi Dana Perimbangan, meskipun nilai nominal semakin meningkat tetapi porsi DAU jauh lebih besar daripada DAK.

Sejalan dengan pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah juga perlu memperhatikan alokasi pemanfaatan dana yang dimiliki. Haryanto (2006) menyebutkan besarnya dana pemerintah yang “parkir” di SBI mengakibatkan dana tersebut tidak mempunyai efek multiplier dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan alokasi anggaran dari pendapatan yang telah diterima karena penempatan dana yang tepat dapat menciptakan efek multiplier dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Waluyo (2007) menunjukkan bahwa DBH baik dari pajak maupun SDA tidak efektif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU lebih berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sistem bagi hasil selama ini hanya menguntungkan daerah yang kaya sumber daya alam dan daerah yang mempunyai potensi pajak yang tinggi. Selain itu, seperti yang telah diketahui umumnya basis pajak yang digunakan di Indonesia adalah berbasis penduduk. Dengan kata lain, pajak terbesar akan diperoleh oleh daerah yang jumlah penduduknya besar. Sehingga daerah kaya sumberdaya alam seperti Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya dan daerah berpenduduk terbesar seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta akan memperoleh DBH yang lebih besar dari daerah yang miskin sumberdaya alam dan berpenduduk rendah.

Penelitian SMERU (2007) yang dikutip Usman (2009) menyebutkan bahwa dana perimbangan khususnya DBH dan DAK secara nasional belum memberikan peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan investasi daerah karena DBH dan proses serta formula perhitungan DAK tergolong relatif kompleks. Selain itu, regulasi DAK yang dikeluarkan pemerintah seringkali terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah perlu mendiskusikan APBD kembali dengan DPRD sehingga menyita waktu aparatur pemerintah daerah dan memerlukan dana tambahan, padahal keuangan daerah terbatas.

Pengaruh positif dari dana perimbangan di tingkat provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah, terutama provinsi, masih membutuhkan peranan pemerintah pusat untuk meningkatkan penciptaan outputnya. Porsi dana perimbangan dalam keuangan daerah juga dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah lokal terhadap pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Terutama bagi daerah yang mayoritas pengeluarannya dibiayai dari Dana Perimbangan. Jika terjadi keadaan dimana pemerintah pusat harus mengurangi kucuran Dana Perimbangan maka pelayanan publik di daerah tersebut akan terganggu. Oleh karena itu, upaya pengumpulan PAD bagi daerah-daerah tersebut perlu ditingkatkan.

## **2. Hubungan antara investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi daerah**

Koefisien regresi variabel investasi swasta adalah 0,4235 artinya jika investasi swasta naik 1%, ceteris paribus, maka PDRB akan tumbuh 0,42%. Hubungan positif antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan studi-studi sebelumnya, yaitu Lin dan Liu (2000), Meloche, Vallaincourt dan Yilmaz (2004), Brata (2004), Ahmad (2005), Suska (2007), Wibowo (2008) dan Usman (2009).

Hubungan positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ini sejalan dengan konsep penghitungan PDRB dengan metode pengeluaran dimana output adalah penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor. Selain itu, teori pertumbuhan ekonomi menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah output adalah tenaga kerja dan kapital dimana penambahan investasi akan meningkatkan modal (*capital*).

Koefisien regresi Penanaman modal yang rendah juga dialami oleh Wibowo (2008) dan Usman (2009). Studi Wibowo (2008) menunjukkan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi domestik di beberapa daerah memerlukan jangka waktu tertentu untuk memperoleh *return* sebagaimana mestinya (Ashipala dan Haimbodi, 2003) atau belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah

bisa jadi bukan merupakan investasi yang cukup produktif sehingga tidak memberikan insentif ekonomi (Devarajan et al, 1996).

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih kecil dari penambahan investasi swasta. Hal ini mungkin disebabkan masih terdapat peraturan yang dibuat pemerintah daerah yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya peraturan daerah yang dicabut oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Hasil evaluasi Departemen Keuangan terhadap perda yang berkaitan dengan pungutan daerah yang dikutip Hirawan (2006) menunjukkan bahwa sekitar 607 perda dari 7.510 perda yang dievaluasi dari tahun 2001 hingga november 2005 merupakan perda yang bermasalah. KPPOD telah membatalkan 475 perda atau 6,32%. Selain itu, studi LPEM FEUI (2001) tentang *cost of doing business*, mensinyalir bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah meningkatkan biaya pungutan yang harus ditanggung sektor swasta yang besarnya mencapai 9-11% dari biaya perusahaan.

Penelitian Ray (2003) yang dikutip Usman (2009) menunjukkan bahwa diawal desentralisasi fiskal, belum ada perbaikan iklim usaha yang signifikan sejak diberlakukan otonomi daerah. Pemerintah daerah berlomba-lomba membuat peraturan baru yang awalnya diniatkan untuk meningkatkan pendapatan terutama PAD yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena peraturan-peraturan tersebut justru memperberat para pelaku ekonomi baik pengusaha maupun masyarakat. Peraturan baru tidak memberi insentif agar pelaku ekonomi semakin beraktivitas sehingga roda perekonomian bergerak sehingga terbentuk pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Mudrajad (2004) yang juga dikutip Usman (2009) menyebutkan faktor lain yang dinilai menghambat iklim penanaman modal swasta adalah rendahnya pelayanan publik dari sisi ketidakpastian biaya dan lamanya waktu untuk berurusan dengan birokrasi, kurangnya kepastian hukum dan masih banyaknya pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus disetor pengusaha kepada para petugas dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya.

Banyak peraturan yang menghambat iklim usaha tersebut mengindikasikan pemerintah kurang memahami perkembangan iklim usaha, baik hambatan yang mungkin dialami para pengusaha maupun peluang yang mungkin dapat diraih.

### **3. Hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi**

Koefisien regresi variabel tenaga kerja adalah 0,7381 yang artinya jika tenaga kerja tumbuh 1%, ceteris paribus, maka PDRB akan tumbuh 0,74%. Hubungan positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan penelitian Ahmad (2005) yang meneliti pertumbuhan ekonomi di Sumatera tahun 1994-2003.

Berbeda dengan Suska (2007) yang menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dicerminkan dengan data jumlah angkatan kerja justru berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan Usman (2009) yang menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dicerminkan dengan jumlah penduduk berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu sumber utama dari pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat jumlah tenaga kerja maka output yang dihasilkan suatu perekonomian akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Hasil estimasi yang kecil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi jauh lebih kecil dari penambahan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, jika tidak dilakukan perbaikan, akan terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja (Ahmad, 2005). Dampak penambahan tenaga kerja terhadap produksi output berkaitan dengan struktur perekonomian daerah yang umumnya didominasi oleh sektor primer dan sektor perdagangan atau jasa non modern. Hasil regresi ini menyiratkan bahwa penambahan tenaga kerja dengan kualitas yang ada kurang dapat diandalkan untuk menopang pertumbuhan dan modernisasi perekonomian provinsi di Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah pusat maupun lokal perlu memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.



Adanya pendidikan, latihan dan pengalaman kerja maka kemahiran (produktivitas) tenaga kerja akan meningkat sehingga peningkatan produksi output diharapkan dapat melebihi penambahan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan kualitas tenaga kerja yang dimiliki suatu daerah juga mempunyai dampak terhadap penciptaan output produksi yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan kualitas tenaga kerja, teori pertumbuhan Schumpeter berpendapat para wirausahawan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Wirausahawan juga merupakan bagian dari tenaga kerja. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang selalu membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi. Para pengusaha ini akan mengumpulkan modal, melalui pinjaman maupun mengumpulkan dana sendiri untuk mengembangkan kegiatan perusahaan dan industri (Sukirno, 1995). Oleh karena itu, para wirausahawan perlu lebih dikembangkan.

#### 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Selain menganalisis dampak tiga variabel bebas tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, penulis juga berupaya melakukan analisis lebih dalam pada pertumbuhan ekonomi beberapa propinsi tertentu. Dalam penelitian ini, dari 26 propinsi yang menjadi data penelitian hanya dilakukan analisis lebih dalam untuk provinsi dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dan terendah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan perbandingan faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kedua provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari nilai koefisien regresi hasil estimasi pada masing-masing provinsi. Tabel berikut menunjukkan peringkat rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang tercermin dari nilai koefisien regresi untuk masing-masing provinsi.

**Tabel 4.3**  
**Peringkat Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi**

Random Effect		Prov
Rank	C	
1	1.3444	Kalimantan Timur
2	0.7739	Riau
3	0.7703	Papua
4	0.5970	Nanggroe Aceh Darussalam
5	0.5095	Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tabel 4.3 (sambungan)

Random Effect		Prov
Rank	C	
6	0.3482	Kalimantan Tengah
7	0.1165	Sumatera Selatan
8	0.0243	Sumatera Barat
9	-0.0174	Sulawesi Tengah
10	-0.0387	Kalimantan Barat
11	-0.0558	Sulawesi Tenggara
12	-0.0629	Sumatera Utara
13	-0.0990	Kalimantan Selatan
14	-0.1037	Sulawesi Utara
15	-0.1755	Jambi
16	-0.2089	Bengkulu
17	-0.2440	Jawa Timur
18	-0.2571	Nusa Tenggara Barat
19	-0.2622	Daerah Istimewa Yogyakarta
20	-0.3143	Bali
21	-0.3549	Lampung
22	-0.3647	Jawa Barat
23	-0.3746	Sulawesi Selatan
24	-0.4821	Maluku
25	-0.4941	Jawa Tengah
26	-0.5742	Nusa Tenggara Timur

Sumber : Output eviews

Dari tabel diatas terlihat bahwa di era Desentralisasi fiskal, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai rata-rata perubahan pertumbuhan tertinggi sedangkan provinsi NTT mempunyai rata-rata perubahan pertumbuhan terendah. Tabel berikut menunjukkan perbandingan realisasi pendapatan dan belanja kedua provinsi tersebut pada tahun 2008, yang merupakan kondisi terkini yang dapat penulis peroleh:

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja**  
**Kalimantan Timur dengan NTT Tahun 2008**

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Kaltim	%	NTT	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.127,50</b>	<b>100,00</b>	<b>946,03</b>	<b>100,00</b>
<b>PAD</b>	<b>2.070,29</b>	<b>33,79</b>	<b>237,29</b>	<b>25,08</b>
Pajak Daerah	1.561,64	75,43	150,72	63,52
Retribusi Daerah	182,80	8,83	32,82	13,83
Kekayaan yg dipisahkan	73,58	3,55	12,71	5,36
lain-lain PAD	252,27	12,19	41,04	17,29

Tabel 4.4 (sambungan)

Uraian	Kaltim	%	NTT	%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>4.050,19</b>	<b>66,10</b>	<b>708,74</b>	<b>74,92</b>
DBH			-	
- DBH Pajak	548,18	13,53	53,76	7,59
- DBH SDA	3.375,77	83,35	0,06	0,01
DAU	126,24	3,12	616,60	87,00
DAK	0,00	0,00	38,32	5,41
<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>7,02</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>	<b>5.640,40</b>	<b>100,00</b>	<b>934,17</b>	<b>100,00</b>
Belanja Operasi	3.985,04	70,65	723,29	77,43
Belanja Modal	1.654,36	29,33	<b>202,72</b>	21,70
Belanja Tak Terduga	1,00	0,02	8,16	0,87

Sumber: LHP BPK-RI

Penerimaan dalam negeri memegang peranan yang sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan. Penerimaan pemerintah merupakan instrumen untuk meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian (Susanti, 2007). Dari tabel diatas terlihat bahwa PAD berperan sekitar sepertiga dari total pendapatan yang diperoleh pemerintah Kalimantan Timur. Sedangkan di NTT, PAD berperan sekitar seperempat dari total pendapatan yang diperoleh. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengumpulan PAD di Kalimantan Timur lebih baik dari upaya pengumpulan PAD di NTT.

Dari komposisi sumber pendapatan Dana Perimbangan terlihat bahwa DBH SDA merupakan sumber dominan bagi Kalimantan Timur, yaitu 83,35% dari total Dana Perimbangan. Merupakan hal yang wajar bagi Kalimantan Timur mempunyai DBH SDA sebagai sumber pendapatan yang paling dominan karena daerahnya kaya SDA, yaitu minyak. Hal ini juga perlu diwaspadai karena SDA adalah sumberdaya terbatas yang nantinya akan habis. Pemerintah Kalimantan Timur perlu meningkatkan upaya pengumpulan PAD-nya agar tidak hanya bergantung pada DBH SDA semata.

Sedangkan 87% dari total Dana Perimbangan di NTT berasal dari DAU. Dominannya peranan DAU dalam total Dana Perimbangan provinsi NTT mengindikasikan daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang kurang dibanding dengan daerah lain. Berdasarkan konsep celah fiskal yang digunakan untuk menghitung DAU maka hal tersebut menunjukkan kapasitas Fiskal NTT dinilai belum mencukupi kebutuhan fiskalnya.

Pertumbuhan PDB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Salah satu jenis pengeluaran untuk menghitung pendapatan nasional (PDB) adalah konsumsi pemerintah. Dari data realisasi pendapatan dan belanja diatas terlihat bahwa, Kalimantan Timur membelanjakan sebesar 5,64 trilyun Rupiah atau 92,05% dari pendapatan yang diterima, yaitu 6,13 trilyun Rupiah. Sedangkan NTT membelanjakan sebesar 934,17 milyar Rupiah atau 98,75% dari pendapatan yang diterima, yaitu 946,03 milyar Rupiah. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa rasio pengeluaran pemerintah terhadap total pendapatan di NTT lebih besar dari Kalimantan Timur, namun secara nilai nominal terjadi sebaliknya. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, pengeluaran untuk penambahan *capital stock* akan menunjang kenaikan produksi atau penciptaan output yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan komposisi belanja yang dilakukan, 29,33% dari total belanja Kalimantan Timur adalah belanja modal sedangkan belanja modal di NTT adalah 21,70% dari total belanja. Belanja modal ini akan menambah *capital stock* yang menunjang kenaikan produksi. Dari data perbandingan tersebut menunjukkan Kalimantan Timur lebih baik dalam berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak sembarang belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa jadi bukan merupakan investasi yang cukup produktif sehingga tidak memberikan insentif ekonomi (Devarajan et all, 1996).

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Investasi Swasta Kalimantan Timur dan NTT**  
**Tahun 1999-2008**

(dalam juta Rp)

<b>Tahun</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>NTT</b>
1999	1.478.820	30.240
2000	2.089.420	49.475
2001	5.527.380	1.093.480
2002	21.660.738	37.350
2003	9.042.075	125.686
2004	2.414.698	27.870
2005	7.554.362	43.252
2006	60.040.846	323.606
2007	42.220.289	240.896
2008	436.670	4.380
<b>Rata-rata</b>	<b>15.246.530</b>	<b>197.624</b>

Sumber: BPS

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata investasi dalam negeri di Kalimantan Timur jauh lebih tinggi daripada NTT. Sesuai dengan teori, investasi akan meningkatkan akumulasi modal sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Struktur tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama dari kedua provinsi tersebut juga berbeda. Tabel berikut menunjukkan perbandingan lapangan pekerjaan utama dari angkatan kerja yang bekerja di Kalimantan Timur dan NTT Tahun 2008:

**Tabel 4.6**  
**Perbandingan Lapangan Pekerjaan Utama dari**  
**Angkatan Kerja yang Bekerja**  
**Kalimantan Timur dan NTT Tahun 2008**

(jiwa)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Kaltim	%	NTT	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	456.968	36,28	1.448.074	69,42
2	Pertambangan	71.085	5,64	18.544	0,89
3	Industri Pengolahan	83.948	6,66	140.866	6,75
4	Listrik, Gas dan Air	4.227	0,34	2.626	0,13
5	Bangunan	81.306	6,45	47.529	2,28
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	258.683	20,54	141.387	6,78
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	83.863	6,66	97.102	4,65
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	24.097	1,91	10.059	0,48
9	Jasa Kemasyarakatan	195.410	15,51	179.918	8,62
<b>Jumlah</b>		<b>1.259.587</b>	<b>100</b>	<b>2.086.105</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS (telah diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tenaga kerja baik di Kalimantan Timur maupun Nusa Tenggara Timur bekerja pada pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebesar 36,28% dan 69,42%. Selain pertanian, jumlah tenaga kerja di provinsi Kalimantan Timur juga cukup dominan bekerja pada sektor perdagangan, yaitu 20,54% dan sektor jasa kemasyarakatan, yaitu 15,15%. Berbeda dengan tenaga kerja di provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas tersedot ke lapangan pekerjaan pertanian.

Menurut teori transformasi struktural oleh W. Arthur Lewis, ekspansi tenaga kerja di sektor modern akan meningkatkan ekspansi output sektor modern

yang kemudian akan menaikkan kapabilitas untuk melakukan investasi (meningkatkan akumulasi modal). Jika dikaitkan hasil data sekunder tersebut dengan teori Lewis maka Kalimantan Timur lebih mampu melakukan akumulasi modal daripada Nusa Tenggara Timur. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja Nusa Tenggara Timur yang mayoritas bekerja di sektor tradisional. Lebih tingginya kemampuan pemerintah Kalimantan Timur dalam melakukan investasi membuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur lebih tinggi daripada Nusa Tenggara Timur.

